MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
ta Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULEN

Dasar : 1. Pertauran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Kamis, 10 September 2026
Waktu : 13.30 WITA
Tempat : Ruang Sidang Utama PTUN Kupang
Acara : Monev Pengelolaan Pemuktahiran Data Pegawai Pada Sikep
Perserta : Seluruh Hakim dan Pegawai PTUN Kupang

Jalannya Monev:

Pengarahan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, menyampaikan terkait tentang Pengelolaan Pemuktahiran Data Pegawai Pada Sikep Sebagai Berikuat:

I. MONEV PENGELOLAAN DAN PEMUKTAHIRAN DATA PEGAWAI PADA SIKEP.

A. Penjelasan Umum

Sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 16310/SEK/KP.7/XI/2025 tentang Pemutakhiran Data Pegawai, seluruh data harus terintegrasi di aplikasi SIKEP.

B. Hasil Pembahasan

- Kelengkapan Data:
  Masih terdapat pejabat yang belum mengunggah sertifikat Bimtek ke SIKEP, contoh: Bapak Jimmiy William Molle, S.H., M.H. dan Ibu Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, S.H., M.H.
- Data yang harus dicek: NIK, Nomor Tanggungan Anak, Nomor Telepon, Email, Tanggal Lahir, Nama Orang Tua, Nama Suami/Istri.
- Dokumen Pendukung:
  SK CPNS, SK PNS, SK Penempatan, Sertifikat Pelatihan, SK Kenaikan Pangkat wajib diunggah.
- Data Pribadi:
- Bagi yang sudah bergelar dan sudah menikah agar segera menyesuaikan data di SIKEP.

C. Arahan Pimpinan - Ibu Wakil Ketua

- Ke Bagian Kepegawaian:

Apakah validasi data di SIKEP dilakukan validasi atau otomatis? Agar setiap hari dilakukan pengecekan dan validasi.

- Ke Seluruh Pegawai:
  Hati-hati dalam melakukan validasi di SIKEP karena kesalahan dapat menyebabkan data terhapus.
- Tindak Lanjut:
  Bagian Kepegawaian dan Ortalak agar membantu Ibu Wakil dalam pembuatan/penerbitan Tanda Tangan Elektronik.

Notulis Melkisedek Seran NIP. 198503252025211036	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H.,M.H. NIP. 197808172003121001

Notulis Melkisedek Seran NIP. 198503252025211036	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Tim Hj. Siti Maisyarah, S.H.,M.H. NIP. 197008242005022002